



Evolusi Pendidikan Kewarganegaraan: dari Pendekatan Berbasis Pengetahuan ke Perspektif yang Lebih Luas

Denda Ginanjar^{1*}, Muhammad Firman², Isep Sunandi³, Wandra Wardiansha Purnama⁴, Nadila Maharani⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Sosial dan Ekonomi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi, Indonesia

dendaginanjar@unlip.ac.id, firmanimani@gmail.com, isepsunandi@unlip.ac.id,
wandra@unlip.ac.id, nadilam534@gmail.com

Korespondensi penulis: dendaginanjar@unlip.ac.id

Abstract. *This research aims to explore the evolution of civic education from a traditional knowledge-based approach towards a broader and more comprehensive perspective. The method used is a literature review by analyzing various sources, including scholarly journals, books, and official documents. The research findings indicate that civic education has undergone significant transformation in recent decades. The traditional approach focused on rote memorization has been replaced by a more holistic perspective emphasizing the development of critical thinking skills, civic participation, and social responsibility. This research contributes new insights by identifying the factors driving the evolution of civic education, as well as its implications for educational practice. In conclusion, civic education today must adapt to the changing times and prepare the younger generation to be active, critical, and responsible citizens.*

Keywords: *Broad Perspective, Citizenship Education, Evolution.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi evolusi pendidikan kewarganegaraan dari pendekatan tradisional berbasis pengetahuan menuju perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis berbagai sumber, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pendekatan tradisional yang berfokus pada hafalan pengetahuan telah digantikan oleh perspektif yang lebih holistik yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, partisipasi sipil, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong evolusi pendidikan kewarganegaraan, serta implikasinya bagi praktik pendidikan. Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan saat ini harus beradaptasi dengan perubahan zaman dan mempersiapkan generasi muda untuk menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: Evolusi, Pendidikan Kewarganegaraan, Perspektif Luas.

1. PENDAHULUAN

Pendidikan kewarganegaraan telah mengalami perubahan yang signifikan seiring berjalannya waktu. Dari sekedar memperoleh pengetahuan dasar tentang sistem politik dan hukum suatu negara, pendidikan kewarganegaraan kini meluas menjadi upaya yang lebih holistik untuk membentuk warga negara yang berpikiran kritis, aktif, dan berperan serta dalam masyarakat. Evolusi ini tercermin dalam pergeseran paradigma dari pendekatan berbasis pengetahuan yang sempit yang berorientasi pada tujuan dan isi semata ke arah yang lebih menekankan pada proses. Pendidikan kewarganegaraan juga harus memperhatikan pendekatan yang bersifat desentralisasi atau otonomi pendidikan baik untuk tingkat daerah, individu sekolah maupun individu guru.

Makalah ini akan menggali evolusi pendidikan kewarganegaraan dari pendekatan berbasis pengetahuan ke perspektif yang lebih luas, serta bagaimana pendidikan berubah dari pendekatan yang berorientasi pada tujuan dan isi semata ke arah yang lebih menekankan pada proses. Studi ini juga akan meneliti bagaimana pendidikan mencetak warga negara yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang setia kepada bangsa dan negara Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam mengembangkan generasi yang berkembang dan berwawasan global. Namun, ada banyak masalah yang terjadi antara *das solen* dan *das sein*, yang disebabkan oleh perubahan supranasional yang meningkatkan pengalaman individu dalam politik di luar sekolah (Zulfikar & Dewi, 2021).

Teori dan penelitian seperti *Grounded Theory*, dapat mendukung pendekatan yang lebih luas dalam memahami pendidikan kewarganegaraan. Lee & Stevenson (1996) berasumsi bahwa ada dua supranasional yang mengakibatkan ekstensi konsep kewarganegaraan dalam kursus pendidikan kewarganegaraan, yaitu perluasan konsep hak asasi manusia dan adaptasi ke realitas ekonomi pasar global. Sejak berdirinya negara Indonesia, pendidikan kewarganegaraan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun, dengan modifikasi mata pelajaran yang disajikan dan terminologi yang digunakan untuk mengajar anak didik khususnya sekolah dasar (Ikhwani, 2023).

Steiner-Khamsi (2002) menggunakan model “*spheres of citizen*” yang menggabungkan teori kewarganegaraan dari ilmu politik, sosiologi, dan filosofi politik. Model ini menggambarkan empat bidang kewarganegaraan yang sistem politik berlaku dengan berbagai derajat kepastian, yaitu konstitusi, ekonomi, sipil, dan moral. Steiner-Khamsi menguji model ini terhadap data dari IEA Civic Education Study dan menemukan bahwa program pendidikan kewarganegaraan di negara-negara Asia memiliki komitmen yang kuat terhadap aspek moral kewarganegaraan.

Makalah ini bertujuan untuk menyoroti perubahan signifikan dalam pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang telah terjadi, serta implikasi pentingnya perubahan tersebut dalam membentuk masa depan pendidikan kewarganegaraan yang lebih inklusif dan relevan. Studi lebih lanjut menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah dapat mengalirkan praktis yang sosial yang tidak seimbang dengan prinsip-prinsip lain, seperti kekeluargaan, pluralisme, dan demokrasi yang dijelaskan dalam sekolah. Steiner-Khamsi menggunakan metode terapi-driven dan menguji model ini terhadap data dari IEA Civic Education Study.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yang menggunakan bahan kepustakaan sebagai sumber data. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui literatur yang terkoordinasi dan terstruktur (Zed, 2014). Data yang diperoleh dari studi pustaka ini kemudian digunakan untuk menentukan dimensi atau domain yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data penelitian ini ialah analisis dokumentasi. Teknik analisis dokumen sendiri merupakan proses Pencairan dan pengumpulan data berupa catatan, buku, makalah, jurnal maupun artikel (Arikunto, 2010)

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam studi kepustakaan ini adalah content analysis atau analisis isi. Menurut Weber dalam (Safitri & Naqiyah, 2021) analisis ini merupakan serangkaian metode untuk membuat kesimpulan dari sebuah data/dokumen yang sudah dikumpulkan supaya hasil yang telah diperoleh valid. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data melalui buku dan beberapa website portal jurnal yaitu google scholar dan science direct.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Studi ini menunjukkan adanya pergeseran yang signifikan dalam pendidikan kewarganegaraan dari pendekatan berbasis pengetahuan menuju perspektif yang lebih luas yang mencakup pemahaman mendalam, pengalaman aktif, dan pengembangan nilai, watak, keterampilan, dan bakat siswa. Temuan utama studi ini adalah bahwa pendidikan kewarganegaraan tidak lagi terbatas pada transfer pengetahuan saja, tetapi juga melibatkan pengalaman aktif yang melibatkan siswa dalam diskusi, simulasi, proyek berbasis masyarakat, dan pengalaman langsung dalam proses demokrasi.

Penggunaan istilah pendidikan kewarganegaraan di Indonesia sendiri sering mengalami perubahan, dan evolusi kewarganegaraan di Indonesia menjadi semakin kompleks. Padahal hakekat membentuk dan mengembangkan warga negara yang cerdas, demokratis, dan religius telah dikukuhkan pada tahun 1947, namun tidak diakomodir oleh mata pelajaran khusus dengan nama seperti Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, atau semacamnya. Namun, mata pelajaran Pendidikan Akhlak tersebut masuk dalam mata pelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI, serta mata pelajaran Pendidikan Agama dari kelas IV sampai dengan kelas VI (Latief et al., 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan ada pada dua tingkatan: tingkat kebijakan atau sosial dan tingkat individu siswa. Pada tingkat sosial, peneliti perlu memahami serangkaian faktor kompleks yang berpotensi mempengaruhi transmisi pengetahuan dan pembelajaran tentang kewarganegaraan, pemerintahan, dan proses politik. Hampir semua institusi sosial besar terlibat, termasuk keluarga, ekonomi, agama, dan media, serta pemerintah dan gerakan politik dan sosial. Tradisi budaya dan sejarah yang khas juga dipertimbangkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran guru sangat penting dalam mengadaptasi kurikulum pendidikan kewarganegaraan agar sesuai dengan pergeseran paradigma yang terjadi. Banyak negara menghadapi kurangnya kurikulum yang memadai dan pelatihan guru dalam bidang ini (Firman et al., 2024). Oleh karena itu, perlu adanya reformasi dalam pendidikan guru untuk memastikan para pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengajar pendidikan kewarganegaraan.

Studi ini menemukan bahwa pendidikan kewarganegaraan di tingkat masyarakat terdiri dari proses dimana identifikasi kolektif diberikan makna pribadi atau pribadi, dan nilai-nilai kewarganegaraan yang diinternalisasikan dan ditindaklanjuti oleh individu seringkali berbeda secara substansial dari nilai-nilai yang coba ditanamkan oleh sistem pendidikan. Pemikiran dan tindakan individu juga dapat mengubah nilai-nilai dan institusi politik publik. Konteks lokal sangat mempengaruhi implementasi pendidikan kewarganegaraan.

Setiap negara memiliki tantangan dan peluang unik dalam mengembangkan pendidikan kewarganegaraan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai mereka (Purnama, 2023). Oleh karena itu, pendekatan yang fleksibel dan adaptif diperlukan untuk memastikan relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam berbagai konteks budaya, politik, dan sosial. Pendidikan kewarganegaraan merupakan sebuah konsep kompleks yang tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mempertimbangkan konteks di mana ia ditemukan. Oleh karena itu, para pendidik dan pembuat kebijakan harus menyadari berbagai dimensi dan domain pendidikan kewarganegaraan dan menghindari penyederhanaan atau kodifikasi konsep yang berlebihan.

Implikasi temuan ini bagi praktik pendidikan, antara lain perlunya perubahan kurikulum, metode pengajaran, dan pemanfaatan TIK, dimana diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap pendidikan kewarganegaraan yang mencakup tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pengembangan keterampilan, nilai, dan pemahaman yang mendalam tentang sistem demokrasi dan kewarganegaraan global. Ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memastikan bahwa pendidikan

kewarganegaraan menciptakan warga negara yang terampil, kritis, dan aktif dalam membangun masyarakat yang inklusif dan demokratis.

Studi ini memiliki relevansi yang tinggi dalam menggambarkan perubahan yang terjadi dalam pendidikan kewarganegaraan dan menunjukkan kepentingan dari pendidikan kewarganegaraan yang lebih luas dalam menggambarkan konsep kewarganegaraan yang lebih luas. Studi ini juga menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaraan di sekolah dapat mengalirkan praktik sosial yang tidak seimbang dengan prinsip-prinsip lain, seperti kekeluargaan, pluralisme, dan demokrasi yang dijelaskan dalam sekolah.

Diskusi

Pada rentang tahun 1990-an, paradigma pendidikan kewarganegaraan bervariasi di berbagai negara. Beberapa negara memandang pendidikan kewarganegaraan sebagai studi tentang pemerintahan, konstitusi, hukum, dan hak serta kewajiban sipil, sementara yang lain memandangnya sebagai studi tentang proses demokratis, kewarganegaraan aktif, dan masyarakat sipil. Di Indonesia, pendidikan kewarganegaraan diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, praktik yang umum di banyak negara. Fokus pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah untuk menanamkan identitas nasional, nilai-nilai moral, dan rasa tanggung jawab terhadap negara dan bangsa di antara siswa dari tingkat SD hingga SMA.

Diperlukan peningkatan pelatihan dan dukungan untuk para guru agar mereka dapat mengembangkan metode pengajaran yang lebih berorientasi pada pengalaman aktif siswa dan pembentukan nilai-nilai kewarganegaraan (Rosita, 2018). Pemerintah perlu memperhatikan perlunya memperkuat pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum nasional serta memberikan dukungan yang cukup untuk pelatihan guru dan pengembangan sumber daya (Lembong et al., 2023). Pendidikan kewarganegaraan memainkan peran penting dalam membentuk identitas sipil siswa, mempromosikan kreativitas, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial.

Pendidikan kewarganegaraan telah mengalami evolusi yang signifikan dari masa ke masa. Menurut Banks (2024), “pendidikan kewarganegaraan telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, dari fokus pada aspek pengetahuan dan keterampilan dasar menjadi penekanan pada pemahaman mendalam tentang pluralisme, identitas kelompok, dan partisipasi aktif dalam masyarakat demokratis. Pendekatan berbasis pengetahuan dalam pendidikan kewarganegaraan menekankan pentingnya memperoleh pengetahuan tentang sistem politik, sejarah, dan nilai-nilai demokratis. Alfiansyah & Wangid (2018) menjelaskan, “Pendekatan berbasis pengetahuan dalam pendidikan kewarganegaraan

menekankan pentingnya mempersiapkan siswa dengan pengetahuan yang luas tentang struktur politik, proses demokratis, dan nilai-nilai mendasar dalam masyarakat.

Meskipun pendekatan berbasis pengetahuan memiliki nilai yang penting, banyak yang mengkritik pendekatan ini karena kurang memperhatikan pengembangan keterampilan kritis dan partisipasi aktif. Laka et al. (2024) menyatakan, “Kritik terhadap pendekatan berbasis pengetahuan menyoroti kecenderungan pendidikan kewarganegaraan untuk membatasi diri pada pemindahan pengetahuan tanpa memperhatikan pengembangan keterampilan berpikir kritis dan partisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat”. Ini berarti siswa hanya diberi informasi tanpa diberikan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka untuk menganalisis informasi, bertindak secara kritis, dan berpartisipasi dalam proses demokratis secara efektif. Sebagai hasilnya, pendidikan kewarganegaraan menjadi terbatas dalam menciptakan warga negara yang benar-benar aktif, kritis, dan bertanggung jawab (Santoso, 2022)..

Pendekatan yang lebih luas dalam pendidikan kewarganegaraan menekankan inklusi nilai-nilai kritis, keterampilan kritis, dan penguatan partisipasi aktif dalam masyarakat. Yuniarto & Yudha (2018) mengungkapkan, “Perspektif yang lebih luas dalam pendidikan kewarganegaraan menuntut pengembangan keterampilan berpikir kritis, penilaian yang cermat terhadap informasi, dan kemampuan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses demokratis”. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk membekali generasi muda dengan kemampuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara aktif dalam masyarakat dan pemerintahan, serta untuk menjadi warga negara yang sadar dan bertanggung jawab.

Guru memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pengetahuan tentang sistem politik, sejarah negara, dan nilai-nilai demokratis kepada siswa (Oktavia, 2023). Mereka membantu siswa memahami prinsip-prinsip dasar demokrasi, hak-hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Guru berperan sebagai mentor dan pembimbing bagi siswa dalam pengembangan sikap kritis, empati, dan tanggung jawab sosial. Mereka membantu siswa memahami konsekuensi dari tindakan mereka dalam konteks masyarakat dan memotivasi mereka untuk bertindak secara positif (Lado & Windarti, 2024).

Transisi menuju perspektif yang lebih luas dalam pendidikan kewarganegaraan memiliki implikasi yang penting bagi kebijakan pendidikan dan praktik pengajaran. Levinson (2012) menyoroti, “Implikasi dari transisi ini mencakup perlunya mengintegrasikan pengembangan keterampilan kritis dan partisipasi aktif dalam kurikulum pendidikan kewarganegaraan, serta menyesuaikan praktik pengajaran dengan tuntutan zaman yang terus berubah. Untuk

menumbuhkan kewarganegaraan yang kritis, aktif, dan bertanggung jawab, kurikulum harus lebih dari sekadar menanamkan pengetahuan, namun juga menumbuhkan perspektif kritis terhadap isu-isu sosial dan politik, serta mengembangkan keterampilan kognitif, sosial, dan organisasi yang diperlukan untuk partisipasi yang efektif.

Pendidikan kewarganegaraan pada hakekatnya dapat beroperasi sebagai pendidikan demokrasi dalam jalur pendidikan resmi. Seperti yang dikemukakan Azra Zaromi dalam Ubedillah et al. (2009: 7) bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan menyiapkan warga negara untuk berpikir kritis dan bertindak secara demokratis, melalui kegiatan penyadaran generasi baru tentang kesadaran itu. Demokrasi adalah jenis kehidupan sosial yang paling menjamin hak-hak masyarakat; demokrasi adalah proses pembelajaran yang tidak bisa ditiru dari yang lain; kemerdekaan demokratis tergantung pada kemampuan untuk mengubah prinsip-prinsip demokrasi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Evolusi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia merupakan proses yang kompleks dan dinamis. Perspektif baru dalam pendidikan kewarganegaraan menawarkan peluang untuk mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan bagi pemahaman tentang evolusi pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian kualitatif untuk mempelajari bagaimana evolusi pendidikan kewarganegaraan diimplementasikan di lapangan, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi evolusi pendidikan kewarganegaraan, dan mengembangkan model pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang efektif untuk abad ke-21.

5. DAFTAR REFERENSI

- Alfiansyah, H. R., & Wangid, M. N. (2018). Muatan pendidikan kewarganegaraan sebagai upaya membelajarkan civic knowledge, civic skills, dan civic disposition di sekolah dasar. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, 6(2), 185-194. <https://doi.org/10.21831/jppfa.v6i2.23764>
- Arikunto. (2010). *Metode Penelitian*. Rineka Cipta.
- Firman, M., Berliana, B., & Warta, W. (2024). School-based management as a method to improve education quality in senior high schools: A perspective on the headmaster's roles. *Paedagogia Jurnal Pendidikan*, 13(1), 81-92. <https://doi.org/10.24239/pdg.Vol13.Iss1.483>

- Ikhwani, D. (2023). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membangun Karakter Bangsa Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pembelajaran dan Pendidikan Islam [JIPPI]*, 1(2). <https://doi.org/10.30596/jippi.v1i2.13>
- Lado, O. U., & Windarti, M. T. (2024). Peran Guru Kristen dalam Membangun Karakter Siswa di Sekolah Multikultural. *Journal New Light*, 2(2), 68-82. Retrieved from <https://ejurnal.stpdianmandala.ac.id/index.php/newlight/article/view/129>
- Laka, L., Darmansyah, R., Judijanto, L., Lase, J. F. E., Haluti, F., Kuswanti, F., & Kalip, K. (2024). *Pendidikan Karakter Gen Z di Era Digital*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Latief, A., Ahmad Al Yakin, S. A., & Ahmad, H. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Lee, S., Graham, T., & Stevenson, H. (1996). Teachers and teaching: elementary schools in Japan and the United States. In: T. P. Rohlen & G. K. LeTendre (Eds), *Teaching and Learning in Japan* (pp. 157-189). New York: Cambridge University Press.
- Lembong, J. M., Lumapow, H. R., & Rotty, V. N. J. (2023). Implementasi merdeka belajar sebagai transformasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Educatio FKIP UNMA*, 9(2), 765-777.
- Oktavia, E. S. (2023). Upaya Penanaman Nilai-nilai Demokrasi Melalui Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial di SMP Negeri 20 Kota Bengkulu (*Doctoral dissertation, UIN FATMAWATI SUKARNO*).
- Purnama, W. W. (2023). Tantangan Perlindungan Dana Nasabah pada Layanan Equity Crowdfunding di Era Industri 4.0: Analisis Peraturan OJK. *DOKTRINA: JOURNAL OF LAW*, 6(2), 174-183. Retrieved from <https://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina/article/view/10344>
- Rosita, L. (2018). Peran pendidikan berbasis karakter dalam pencapaian tujuan pembelajaran di sekolah. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 8(1), 1-26. <https://doi.org/10.34010/JIPSI.V8I1.879>
- Safitri, O. R., & Naqiyah, N. (2021). Literature Study of Modeling Techniques for Middle. *Jurnal Program Studi Bimbingan Dan Konseling*, 8(1), 12-31.
- Santoso, G. (2022). Integrasi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Karakter Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 1(3), 137-145. <https://doi.org/10.9000/jpt.v1i3.404>
- Steiner-Khamsi, G., Torney-Purta, J., & Schwille, J. (Eds.). (2002). *New paradigms and recurring paradoxes in education for citizenship: An international comparison*. Emerald Group Publishing Limited.
- Yuniarto, B., & Yudha, R. P. (2021). Literasi digital sebagai penguatan pendidikan karakter menuju era society 5.0. *Edueksos Jurnal Pendidikan Sosial & Ekonomi*, 10(2). <https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i2.8096>
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan (3 Ed)*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Zulfikar, M. F., & Dewi, D. A. (2021). Pentingnya pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa. *JURNAL PEKAN: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(1), 104-115. <https://doi.org/10.31932/jpk.v6i1.1171>